

# LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

**LAPORAN KINERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN  
TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2024 yang disusun dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-4/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut LAKIN KPP Pratama Pekanbaru Senapelan merupakan laporan kinerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk periode tahun 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mengacu pada Kontrak Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024, amanat yang tercantum dalam Renstra DJP, prioritas nasional, dan kaitannya dengan Renja/RKA tahun 2024.

LAKIN KPP Pratama Pekanbaru Senapelan disusun untuk melaksanakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPP Pratama Senapelan serta merupakan wujud pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Kpp Pratama Senapelan sebagai salah satu unit satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam pelaksanaan tugas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, terdapat permasalahan utama yang dihadapi di tahun 2024, yaitu:

1. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh yang masih rendah
2. Upaya intensifikasi perpajakan yang masih harus digiatkan guna mencapai target penerimaan
3. Kegiatan ekstensifikasi yang belum berjalan optimal sehingga penambahan basis pajak belum signifikan

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan merupakan satuan kerja di bawah lingkup Kantor Wilayah DJP Riau yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.247, Kota Pekanbaru. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki tugas sebagai instansi penghimpun penerimaan pajak serta memiliki fungsi sebagai administrasi perpajakan untuk Wajib Pajak yang terdaftar di sebagian wilayah Pekanbaru, dengan wilayah kerja meliputi :

1. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari Kelurahan : Melebung, Tangkerang Timur, Bencah lesung, Industri Tenayan, Rejosari, Tuah Negeri, Agrowisata, Bambu Kuning, Sialang Sakti;
2. Kecamatan Sail yang terdiri dari Kelurahan : Cinta Raja, Sukamaju, Sukamulya;
3. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari Kelurahan Tanjung Rhu, Sekip, Pesisir, dan Rintis;
4. Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari Kelurahan : Kota Tinggi, Kota Baru, Sukaramai, Sumahilang, Tanah Datar, dan Simpang Empat;
5. Kecamatan Senapelan yang terdiri dari Kelurahan : Kampung Baru, Kampung Bandar, Padang Terubuk, Padang Bulan, Sago dan Kampung Dalam;
6. Kecamatan Kulim yang terdiri dari Kelurahan : Kulim, Pebatuan, Sialangrampai, Mentangor, Pematangkapau;
7. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari Kelurahan : Umban Sari, Sri Meranti, Palas, Lembah Damai, Limbungan Baru, Meranti Pandak;
8. Kecamatan Rumbai Timur yang terdiri dari Kelurahan : Lembah Sari, Limbungan, Tebing Tinggi Okura, Sungaiambang, Sungaiukai;
9. Kecamatan Rumbai Barat yang terdiri dari Kelurahan : Rumbai Bukit, Muarafajar Timur, Muarafajar Barat, Rantau Panjang, Maharani, Agrowisata.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hingga 31 Desember 2024 mencapai 215.382 wajib pajak, meliputi Wajib Pajak aktif yaitu 58.301 dengan pembagian wajib pajak sebagai berikut :

- Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Bendahara) sebanyak 193
- Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 49.214
- Wajib Pajak Badan sebanyak 8.894

sedangkan untuk Wajib Pajak Non Efektif terdiri dari 140.364 wajib pajak dan sebanyak 16.717 wajib pajak berstatus DE (hapus) dengan pembagian wajib pajak sebagai berikut :

- Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Bendahara) sebanyak 1.792
- Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 143.365
- Wajib Pajak Badan sebanyak 11.924

Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan per 31 Desember 2024 berjumlah sebanyak 101 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

- 1 (satu) Pejabat Eselon III;
- 9 (sembilan) Pejabat Eselon IV;
- 20 (dua puluh) Fungsional Pemeriksa Pajak;
- 1 (satu) Asisten Fungsional Penilai;
- 2 (dua) Fungsional Penyuluh Pajak;
- 3 (tiga) Asisten Fungsional Penyuluh; serta
- 33 (tiga puluh tiga) *Account Representative*
- 3 (tiga) Juru Sita Pajak Negara
- 1 (satu) Sekretaris
- 1 (satu) Bendaharawan
- 27 (dua puluh sembilan) Pelaksana

Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;

- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar A.1 Struktur Organisasi

**C. Sistematika Laporan**

- Pengantar
- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Perencanaan Kinerja
- Bab III: Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV: Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Terdapat indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tusi DJP antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

Relevansi Tusi DJP terhadap RPJMN sangat berkaita untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan pelayanan berbasis teknologi yang andal. Pelaksanaan CoreTax menjadi landasan strategis untuk mencapai target rasio perpajakan yang lebih tinggi serta mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki penerimaan dominan selama tahun 2024 di sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan serta kegiatan jasa lainnya.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang berkembang dengan sangat pesat. Proyek – proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN maupun APBD terus berlangsung hingga saat ini. Tujuannya tidak lain untuk mempersiapkan infrastruktur yang baik agar para investor datang ke Bumi Lancang Kuning untuk menanamkan investasinya.

Pekanbaru yang dahulunya bernama Senapelan merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Riau juga merupakan Ibukota Provinsi Riau. Saat ini pembangunan di Pekanbaru sangat pesat. Pembangunan gedung – gedung besar seperti *mall*, hotel dan perkantoran terus bertambah. Ini merupakan salah satu indikator adanya investor yang menanamkan investasinya di kota ini.

Perkembangan kota yang pesat dan investasi yang masuk di Pekanbaru tentunya akan menjadi potensi perpajakan yang dapat terus digali oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan di waktu yang akan datang.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan empat perspektif,

yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
<b>Stakeholder Perspective</b>					
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100.25%
2		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103.02
<b>Customer Perspective</b>					
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,12%
4		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,43 %
5	Kepatuhan tahun	3a-CP	Persentase realisasi	100,00%	101,83%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
	sebelumnya yang tinggi		penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		
<b>Internal Process Perspective</b>					
6	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00 %	84,00%
7		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	110,84%
8	Persentase Pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase Pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,62%
9	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,05%
10		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,50%
11		6c-N	Efektivitas Pengelolaan	100,00%	117,07%

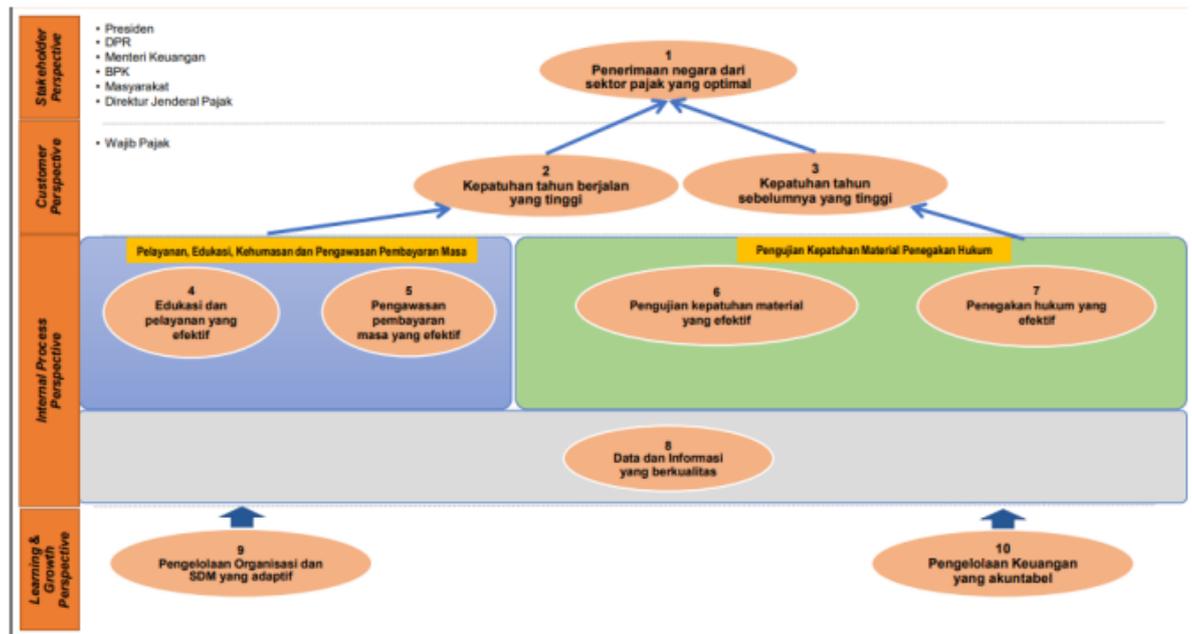
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
			Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		
12	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	116,96%
13		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,84%
14		7c-N	Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%
15	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%
16		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,00%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>					
17	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,36

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
18		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	79,01
19		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33
20	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	115,83

Uraian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal  
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja utama berupa persentase realisasi penerimaan pajak dan persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto.
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi  
Indikator persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur utama untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi  
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang menjadi satu-satunya IKU yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis ini.
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif  
Sasaran strategis ini diukur menggunakan dua IKU yaitu Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan Indeks

- kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif  
Persentase pengawasan pembayaran masa menjadi satu-satunya Indikator Kinerja Utama untuk mengukur Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa yang efektif
  6. Pengujian kepatuhan material yang efektif  
Fungsi pengawasan oleh kantor pelayanan pajak diukur dengan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
  7. Penegakan hukum yang efektif  
IKU yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis Ini adalah Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, Tingkat efektivitas penagihan dan Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
  8. Data dan informasi yang berkualitas  
Sasaran strategis ini diukur dengan IKU yaitu Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
  9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif  
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, menjadi alat ukur untuk melihat seberapa jauh kualitas SDM yang dimiliki sebuah organisasi. Efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang dipaparkan oleh Pejabat Administrator serta Indeks Penilaian Integritas Unit menjadi indikator untuk mengukur kehandalan sebuah organisasi.
  10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel  
Penggunaan anggaran yang akuntabel diperlukan untuk membiayai kinerja organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas pengelolaan anggaran di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.



### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI baru, hapus, maupun perbaikan.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Adapun capaian kinerja organisasi pada tahun 2024 sebagai bahan perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI								
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
KANWIL DJP RIAU								
KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN								
PERIODE PELAPORAN: S.D. DESEMBER TAHUN 2024								
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target Q4	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,42
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,42
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,25%	Max	E/L	26%	57,78%	100,25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,02	Max	P/L	19%	42,22%	103,02
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,04
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,25
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,12%	Max	E/L	26%	57,78%	100,12
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,43%	Max	P/L	19%	42,22%	100,43
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,83
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,83%	Max	E/M	21%	100,00%	101,83
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,03
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,42
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,84%	Max	E/M	21%	50,00%	110,84
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,62%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,87
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,05%	Max	P/M	14%	33,33%	117,05
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,50%	Max	P/M	14%	33,33%	119,50
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,07%	Max	P/M	14%	33,33%	117,07
7	Penegakan hukum yang efektif							111,87
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,96%	Max	P/M	14%	26,92%	116,96
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,84%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	113,27
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							106,55
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtalanan SDM	100,00	116,36	Max	P/M	14%	33,33%	116,36
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	79,01%	Max	P/M	14%	33,33%	92,95
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33	Max	P/M	14%	33,33%	110,37
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>108,21</b>

\*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Sumber : Aplikasi Mandor 14 Januari 2025 pukul 15:09:01

Capaian NKO KPP Pratam Pekanbaru Senapelan sebesar 108,21, capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan NKO tahun 2023 yaitu 103,18. Hampir seluruh Indikator kinerja utama yang besarnya melebihi target, kecuali pada IKU Indeks Penilaian Integrasi Unit.

**B. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
<b>Stakeholder Perspective</b>						
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.25%	103.31%	132.29%
2		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	103.02	115.42	109.14
<b>Customer Perspective</b>						
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,12%	111.32%	149.47%
4		2b-CP	Persentase capaian	100,43 %	83.96%	81.40%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
			tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi			
5	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	101,83%	40.36%	95.45%
<b>Internal Process Perspective</b>						
6	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88,00%		
7		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas	110,84%	82.76%	86.99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
			penyuluhan			
8	Persentase Pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase Pengawasan pembayaran masa	116,62%	115.32%	98.93%
9	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	117,05%	108.79%	111.79%
10		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,50%	119.44%	
11		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	117,07%		
12	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	116,96%	117.03%	100.20%
13		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	117,84%	114.00%	120.00%
14		7c-N	Persentase Penyampaian	100,00%		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
			Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			
15	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan data potensi perpajakan	120,00%	126,93%	120.00%
16		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	85,00%	75,69%	
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>						
17	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	116,36		
18		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	79,01	93.39	93.21

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
19		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	99,33	98.87%	100.00%
20	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	115,83	100.12%	98.64%

## A. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

- 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	51,00%	51,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,34%	47,08%	47,08%	74,89%	74,89%	100,25%	100,25%
Capaian	101,55%	92,31%	92,31%	99,85%	99,85%	100%	100,25%

- **Deskripsi**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- 
- **Realisasi IKU**

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PEKUMBUHAN			
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO		NETTO	BRUTO	NETTO	
1	PRATAMA BANGKINANG	1,930,973,518,000	1,928,210,180,525	0	117,044,504,100	-26,235,515,133	28,943,723,844	2,047,962,995,336	107,389,139,700	1,940,573,855,636	1,865,408,639,440	1,792,557,011,120	100.5	9.79	8.26	
2	PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	3,368,212,330,000	3,581,766,991,028	0	116,954,399,451	-29,539,544,026	24,542,832,476	3,693,724,728,929	308,531,129,293	3,385,193,599,636	3,133,848,214,902	2,863,588,157,869	100.5	17.87	18.22	
3	PRATAMA RENGAT	1,378,349,438,000	1,327,489,171,512	0	70,819,621,988	-18,581,649,417	10,537,731,501	1,389,864,875,584	5,696,548,388	1,384,168,327,196	1,331,408,231,810	1,327,814,251,416	100.42	4.39	4.24	
4	PRATAMA DUMAI	2,204,368,350,000	2,846,851,079,436	6,059,362,896	28,241,494,202	-18,143,486,579	20,573,969,900	2,883,582,419,855	671,650,216,583	2,211,932,203,272	2,672,596,375,084	2,037,089,926,559	100.34	7.89	8.58	
5	PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	1,933,004,219,000	1,908,009,112,945	0	77,173,043,292	-10,079,545,398	10,119,192,779	1,985,221,803,618	47,453,041,228	1,937,768,762,390	1,818,676,975,233	1,780,608,213,635	100.25	9.16	8.83	
6	PRATAMA PANGKALAN KERINCI	2,304,947,172,000	2,328,236,299,091	0	11,772,243,746	-14,381,725,872	18,024,558,647	2,343,651,375,612	34,957,996,178	2,308,693,379,434	2,287,299,000,620	2,258,144,961,800	100.16	2.46	2.24	
7	PRATAMA BENGKALIS	2,356,479,179,000	2,344,672,797,621	0	22,112,537,162	-10,643,232,616	9,401,160,205	2,365,543,262,372	5,451,087,283	2,360,092,175,089	2,272,915,094,810	2,269,034,429,460	100.15	4.08	4.01	
8	MADYA PEKANBARU	7,695,076,636,000	10,583,689,604,416	3,718,358,132	106,405,566,386	-59,589,422,149	48,286,706,260	10,682,510,813,045	2,978,848,027,223	7,703,662,785,822	11,988,430,835,895	8,831,178,731,353	100.11	-10.89	-12.77	
<b>Jumlah</b>			23,171,411,475,000	26,848,925,236,574	9,777,721,028	550,523,410,327	-187,594,021,190	170,429,927,612	27,392,062,274,351	4,159,977,185,876	23,232,085,088,475	27,370,583,367,794	23,160,015,683,212	100.26	0.08	0.31

Sumber: Aplikasi Apportal DJP (<https://appportal/login/>)

URAIAN	TARGET	MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PEKUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	1,846,771,992,000	1,137,870,207,770	0	41,364,184,157	-533,736,178,000	4,875,711,149,000	1,178,376,366,898	5,829,612,991	1,172,546,733,907	1,102,837,747,440	100.49	6.32
1. PPh NON MUDAS	1,846,771,992,000	1,137,870,207,770	0	41,364,184,157	-533,736,178,000	4,875,711,149,000	1,178,376,366,898	5,829,612,991	1,172,546,733,907	1,102,837,747,440	100.49	6.32
1.1 PPh Pasal 11	739,720,626,000	694,467,301,646	0	33,613,208,761	-132,994,589,000	838,682,716,000	667,556,598,553	12,808,000	667,543,790,553	588,407,153,356	90.24	13.45
1.2 PPh Pasal 12	48,524,391,000	58,740,481,340	0	467,109,544	-318,948,672,000	208,057,973,000	59,099,800,188	0	59,099,800,188	46,018,497,471	122.30	26.43
1.3 PPh Pasal 12 Impor	3,478,826,000	4,248,480,623	0	0	0	2,046,900,000	4,250,527,523	0	4,250,527,523	3,009,472,400	122.25	41.23
1.4 PPh Pasal 13	58,758,995,000	70,110,110,320	0	1,826,608,997	-384,544,377,000	266,597,269,000	71,820,774,121	10,272,292	71,810,501,829	105,298,547,162	122.22	-91.80
1.5 PPh Pasal 15 2% OP	58,510,071,000	55,682,437,483	0	20,533,841	-33,418,399,000	170,052,552,000	55,789,803,277	4,007,822,217	51,781,681,060	46,348,165,314	91.94	11.72
1.6 PPh Pasal 15 2% Badan	144,160,524,000	175,583,608,077	0	2,013,087,898	-328,612,825,000	788,157,813,000	178,054,240,940	1,778,212,817	176,276,028,143	145,652,750,941	122.25	21.04
1.7 PPh Pasal 16	2,126,013,000	2,869,652,019	0	0	-10,536,000,000	0	2,596,116,019	0	2,596,116,019	946,694,483	122.25	173.68
1.8 PPh Pasal	113,837,533,000	135,042,702,189	0	3,423,635,296	-3,092,483,541,000	2,611,115,824,000	137,894,769,770	20,397,665	137,915,167,435	166,814,875,103	121.17	-17.29
1.9 PPh Final Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1.10 PPh Non MUDAS Lainnya	0	1,230,432,157	0	0	-11,097,672,000	0	1,219,334,485	0	1,219,334,485	359,385,461	100.00	239.28
2. PPh MUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-944,451	0.00	100.00
2.1 PPh Milyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-944,451	0.00	100.00
2.2 PPh Gaii Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3 PPh Milyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.4 PPh Gaii Alam Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
B. PPh dan PPhBM	674,330,592,000	676,142,066,247	0	31,481,311,820	-4,100,216,840,000	4,782,247,941,000	710,316,009,203	41,623,428,237	668,692,580,966	579,785,172,508	99.16	15.33
1. PPh dan PPhBM	662,170,626,000	663,112,500,536	0	33,481,311,820	-3,046,041,055,000	4,773,634,382,000	698,230,806,143	41,623,428,237	656,607,377,926	565,729,241,308	99.17	16.08
2. PPh Impor	12,089,006,000	12,089,006,222	0	0	0	0	12,089,006,222	0	12,089,006,222	12,529,084,989	100.00	-3.50
3. PPhBM dan PPhBM	0	846,181,873	0	0	-1,030,725,898,000	18,213,099,000	-145,330,926	0	-145,330,926	310,832,542	0.00	-153.19
4. PPhBM Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. PPhBM Lainnya	70,940,000	93,808,918	0	0	-22,849,892,000	0	70,940,026	0	70,940,026	73,460,411	100.00	-3.47
6. PPhBM Lainnya	0	567,718	0	0	0	0	567,718	0	567,718	3,375,215	0.00	-63.18
7. PPh DNI DTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,378,026	0.00	-800.00
8. PPhBM DTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C. PBB dan EPRHTB	17,360,200,000	17,379,651,266	0	0	-445,592,375,000	450,633,669,000	17,384,692,560	0	17,384,692,560	17,161,476,456	100.14	1.30
1. Pajak Daerah PBB	17,360,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-100.00
a. PBB Perumahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b. PBB Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c. PBB Perkebunan	2,334,390,000	2,468,424,718	0	0	-445,592,375,000	450,633,669,000	2,474,466,012	0	2,474,466,012	2,433,188,715	104.00	1.70
d. PBB Kehutanan	103,320,000	110,518,836	0	0	0	0	110,518,836	0	110,518,836	107,489,440	104.97	2.62
e. PBB Pertambangan Mineral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f. PBB Migas	14,922,499,000	14,799,707,712	0	0	0	0	14,799,707,712	0	14,799,707,712	14,620,596,281	99.18	1.22
g. PBB Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
h. PBB Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2. Pajak Daerah EPRHTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
D. Pajak Daerah PPh DTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,377,218	0.00	-100.00
1. PPh Pasal 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,998,542	0.00	-100.00
2. PPh Pasal 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. PPh pasal 12 Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4. PPh Pasal 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5. PPh Pasal 15 2% OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6. PPh Pasal 15 2% Badan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

7 PPh Pasal 26	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8 PPh Final	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	522.378,676	-100,00
9 PPh Non Muga lainnya DTP	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
JUMLAH D	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.065.377,258	-100,00
E Pajak Lainnya	74.541.426,000	76.817.187,642	0	2.327.547,315	0,00	0,00	79.144.734,957	0	79.144.734,957	79.738.419,973	106,18	-0,73
1 Bea Meterai	249.436,000	249.436,000	0	0	0,00	0,00	249.436,000	0	249.436,000	418.609,000	100,00	-40,41
2 Penjualan Benda Meterai	74.286.238,000	76.562,000,000	0	0	0,00	0,00	76.562,000,000	0	76.562,000,000	79.040,000,000	103,06	-3,14
3 PTLL	5.751,000	5.751,642	0	0	0,00	0,00	5.751,642	0	5.751,642	8.068,640	99,99	-18,72
4 Bunga Penghasilan PPh	0	0	0	2.327.547,315	0,00	0,00	2.327.547,315	0	2.327.547,315	261.742,333	0,00	789,25
5 Bunga Penghasilan PPhN	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6 Bunga Penghasilan PPhSEM	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7 Bunga Penghasilan PTLL	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8 PIS	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9 PPh Baku Bera	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.933.004.219,000	1.908.009.112,845	0	77.173,043,292	-10,079,545,398,00	10,119,192,779,00	1.985.221.803,618	47.453,041,228	1.971.769,742,399	1.780.608.213,635	100,25	8,83

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	94.4	132.44	103.36	100.25

- 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	103,8	96,25	96,25	102,79	102,79	103,02	103,02
Capaian	103,8	96,25	96,25	102,79	102,79	103,02	103,02

- **Deskripsi**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	216. PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	114.49 %	100.00 %	107.25 %
2	222. PRATAMA PANGKALAN KERINCI	99.52 %	110.00 %	104.76 %
3	221. PRATAMA BANGKINANG	106.64 %	100.00 %	103.32 %
4	211. PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	106.03 %	100.00 %	103.02 %
5	212. PRATAMA DUMAI	104.79 %	100.00 %	102.40 %
6	219. PRATAMA BENGKALIS	101.09 %	100.00 %	100.55 %
7	213. PRATAMA RENGAT	101.40 %	90.00 %	95.70 %
8	218. MADYA PEKANBARU	86.55 %	90.00 %	88.28 %

Target penerimaan yang diemban KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2024 sebesar Rp 1,933,004,219,000,- yang mana target ini lebih besar dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp 1,780,608,213,635,-. Berdasarkan data MPN, hingga akhir triwulan IV tahun 2024 KPP Pratama Pekanbaru Senapelan berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 1,937,768,762,390,- atau mencapai 100.25% dari target. Pertumbuhan netto penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh positif 8.83% dari pertumbuhan netto penerimaan pajak tahun 2023. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2024 adalah sebesar 106.03% dengan deviasi sebesar 100,00% sehingga indeks capaian realisasinya adalah 103.02%.

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	103.02	115.42	109.14

**B. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

- 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	51,00%	51,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,66%	49,00%	49,00%	75,95%	75,95%	100,12%	100,12%
Capaian	103%	96,08%	96,08%	101,27%	101,27%	100%	100,12%

- **Deskripsi**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan

Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Data Penerimaan PPM PKM									
Per Unit Kerja									
2024		Januari		Desember		Pilih		Data update terakhir: 15-01-2025 22:11:47 WIB	
Unit Kerja	PPM					PKM			
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %
040 - KANWIL DJP RIAU	21.413.654.904.000	21.459.328.417.313	100.21%	100.00%	100.21%	1.757.756.571.000	1.772.756.671.162	100.85%	100.00%
211 - PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	1.788.111.991.000	1.790.229.718.149	100.12%	100.00%	100.12%	144.892.258.000	147.539.044.241	101.83%	100.00%

Sumber: Aplikasi MANDOR (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>)

Upaya yang telah mendukung tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi ke WP yang terlambat bayar/tidak ada pembayaran rutin
2. Melaksanakan penerbitan sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan Wajib Pajak
3. Mengintensifkan Pengawasan WP yang mengalami kenaikan atau penurunan setoran rutin signifikan
4. Penerbitan Surat Teguran STP Masa
5. Pengawasan kepatuhan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pemberi kerja
6. Pengawasan pembayaran, penyeteran, dan pelaporan perpajakan

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,12%	111.32%	149.47%

- 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	80,80%	91,47%	91,47%	96,01%	96,01%	100,43%	100,43%
Capaian	120%	114,34%	114,34%	106,68%	106,68%	100,43%	100,43%

- **Deskripsi**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Kriteria : WP Gabungan		s.d Desember		Pilih									
0 Jml SPT	60.108 Jml Wajib SPT	49.978 Target SPT	0.00% Realisasi IKU	100.00% Trajektori	0.00% Capaian IKU								
Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Tertambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Tertambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	19.273.366	16.038.802	0.00%	100.00%	0.00%
040 - Kanwil DJP Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	579.153	481.606	0.00%	100.00%	0.00%
211 - KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	0	0	0	0	0	0	0	0	60.108	49.978	0.00%	100.00%	0.00%

Sumber: Aplikasi MANDOR (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>)

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan antara lain:

- Melakukan Monitoring penyampaian SPT Wajib Pajak secara rutin melalui aplikasi;
- Menerbitkan teguran dan STP;
- Melakukan Hibauan, SMS Blast, WA Blast, Kepada seluruh Wajib Pajak yang Belum Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak berjalan;
- Menghubungi pengurus/penanggung pajak/direksi;
- Melakukan Pengawasan kewajiban perpajakan proyek - proyek besar di wilayah kerja KPP

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,43 %	83.96%	81.40%

Jika dibandingkan data kepatuhan penyampaian SPT setiap tahun mengalami peningkatan realisasi, sehingga tahun 2024 dapat melampaui target sebesar 100,43%

### C. Kepatuhan tahun Sebelumnya yang Tinggi

- 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	14,16%	23,00%	23,00%	61,91%	61,91%	101,83%	101,83%
Capaian	56,64%	46,00%	46,00%	82,55%	82,55%	102%	101,83%

- **Deskripsi**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

"Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak."

- **Formula IKU**

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

**Data Penerimaan PPM PKM**  
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih
Data update terakhir: 15-01-2025 22:11:47 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM			
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %
040 - KANWIL DJP RIAU	21.413.654.904.000	21.459.328.417.313	100.21%	100.00%	100.21%	1.757.756.571.000	1.772.756.671.162	100.85%	100.00%
Z11 - PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	1.788.111.961.000	1.790.229.718.149	100.12%	100.00%	100.12%	144.892.258.000	147.539.044.241	101.83%	100.00%

Sumber: Aplikasi MANDOR (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>)

KPP Pratma Pekanbaru Senapelan melakukan banyak upaya sehingga realiasi IKU ini dapat mencapai 101,83%. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai penerimaan dari pengawasan kepatuhan material tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Menyelesaikan seluruh SPTLB pada tahun 2024
2. Menyelesaikan tunggakan penghapusan NPWP
3. Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan tahun pajak 2019
4. Menyelesaikan pemeriksaan khusus yang sudah berumur lebih dari lima bulan
5. Pemsus yang berumur lebih dari 8 bulan wajib diselesaikan tahun 2024
6. SP2DK harus ditutup tahun 2024 minimal LHP2DK dalam pengawasan
7. Melakukan permintaan Data Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada KPDJP melalui Kanwil DJP Riau
8. Membuat daftar sasaran WP OP Prominen
9. Melakukan analisa/Penggalian potensi, dengan cara melakukan himbauan terhadap WP OP Prominen
10. Melakukan analisa/Penggalian potensi, dengan cara melakukan penilaian
11. Membuat daftar sasaran WP sektor penunjang kehutanan
12. Membuat daftar sasaran WP 20 besar per AR selain Prominen
13. Pengawasan kewajiban perpajakan proyek - proyek besar di wilayah kerja KPP
14. Pengawasan pelaporan faktur pajak

15. Menerbitkan STP (Memprioritaskan penerbitan STP bagi WP yang sudah dikirimkan Surat Teguran namun tetap tidak patuh)
16. Penelitian data internal (Data Pemicu, Data Penguji, CRM, dsb)
17. Melakukan visit untuk memastikan WP ada dan produktif

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	101,83%	40.36%	95.45%

#### D. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

- 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	40,22%	46,97%	46,97%	84,18	84,18%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	117,43%	117,43%	120%	120%	120%	120,00%

- **Deskripsi**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

#### Data Unit Kerja

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	100.00 %	18.50 %	44.55 %	28.12 %	48.18 %	42.18 %	88.80 %	23.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4114020000	KPP Pratama Pekanbaru Senapeelan	100.00 %	18.50 %	44.55 %	28.12 %	48.18 %	42.18 %	88.80 %	23.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber: Aplikasi MANDOR (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>)

Realisasi IKU ini melebihi target yaitu 120%, hal ini dapat diraih dengan berbagai upaya yaitu:

1. Mengadakan kelas pajak luring dan daring lebih sering
2. Melakukan bimbingan pengisian SPT di tempat pemberi kerja
3. Koordinasi dengan bidang P2Humas kanwil terkait dengan kegiatan layanan di luar kantor dan penyuluhan tidak langsung (Radio, TV)
4. Meningkatkan kemampuan / kapasitas SDM pendukung edukasi dan pelayanan

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88,00%		

➤ 04-bN Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	5%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,35%	6,39%	12,72%	18%	18%	110,84	110,84
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	110,84%

- **Deskripsi**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

"Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan."

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Realisasi Tahun 2024 mencapai 110,84%, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan berusaha selalu Memberikan materi penyuluhan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dan Mempercepat penyelesaian permohonan wajib pajak hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang dirasakan oleh Wajib Pajak, Beberapa kendala yang ditemukan adalah kesulitan yang dihadapi Tim Penyuluh dalam menjawab beberapa pertanyaan Wajib Pajak mengenai peraturan yang belum ada petunjuk teknisnya.

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	110,84%	82.76%	86.99



Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

$$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \left( (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) + \left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

$$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left( ((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) + \left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$$

### • Realisasi IKU



Sumber: Aplikasi MANDOR (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>)

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target IKU persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis adalah dengan Melakukan penerbitan STP berdasarkan daftar nominasi yang tersedia pada aplikasi approweb sehingga Iku dapat tercapaik hingga 116.62%

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	116,62%	115.32%	98.93%

**F. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif**

- 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	58,69%	60,39%	60,39%	75,84%	75,84%	117,05%	117,05%
Capaian	58,69%	60,39%	60,39%	75,84%	75,84%	120,00%	117,05%

- **Deskripsi**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)	
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK		
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j
040. KANTOR WILAYAH DJP RIAU	1.442,00	2.564,40	120,00%	1.442,00	1.880,75	690	485,45	120,00%	120,00%
I PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	160,00	215,00	120,00%	160,00	128,35	93	70,30	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi MANDOR (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>)

Untuk dapat mencapai capaian 120%, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah melakukan Melakukan visit/kunjungan ke lokasi wajib pajak, Melakukan himbauan terhadap wajib pajak dan memberikan himbauan kepada wajib pajak yang memiliki proyek

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	117,05%	108.79%	111.79%

➤ 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	101,75%	113,59%	113,59%	114,42%	114,42%	119,50%	119,50%
Capaian	101,75%	113,59%	113,59%	114,42%	114,42%	119,50%	119,50%

- **Deskripsi**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi

ketidapatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- 2) Pemanfaatan Data Matching

- **Formula IKU**

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
---

$\frac{(\quad) + (\quad)}{2}$
-------------------------------

Pemanfaatan Data STP :

_____ 100%
------------

<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
------------------------------------

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)

_____ 100%
------------

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi			Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %		
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total		Nominal STP	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR		Ditindaklanjuti WP	
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (H+J)/2
040 - KANTOR WILAYAH DJP RIAU	12.530	13.170	16.053	7.121	23.150	287.803.774.383	120,00%	7.143	5.619	1.299	6.869	120,00%	120,00%
211 - PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	1.511	1.511	1.670	1.075	2.945	13.756.666.756	120,00%	1.332	1.051	167	1.214	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi MANDOR (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>)

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2024 sebesar 119,50% dari target 100,00% sehingga capaiannya sebesar 119,50. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan juga telah Melakukan pengawasan, himbuan dan kunjungan kepada wajib pajak serta Menutup tindakan pengawasan (LHP2DK)

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,50%	119,44%	

- 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	90,83%	90,83%	117,07%	117,07%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	90,83%	90,83%	117,07%	117,07%

- **Deskripsi**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Membuat laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sebagai bentuk pengawasan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, IKU ini baru dilaksanakan pada tahun 2024, dan realisasi yang didapatkan sebesar 117.07%

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	117,07%		

## G. Penegakan hukum yang efektif

### ➤ 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Realisasi	113,82%	114,90%	114,90%	115,65%	115,65%	116,96%	116,96%
Capaian	113,82%	114,90%	114,90%	115,65%	115,65%	116,96%	116,96%

- **Deskripsi**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

**"(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) +  
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)**

**Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%"**

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebesar 116.96% dari target 100% sehingga capaian IKU adalah 116.96 upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah :

1. Melakukan monitoring jatuh tempo pemeriksaan dengan membuat tabel pengawasan serta target penyelesaian yang diisi oleh FPP
2. Menerbitkan SP2 atas instruksi yang sudah diturunkan, dan menyelesaikan tunggakan pemeriksaan khusus dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan pemeriksaan
3. Melaksanakan pemeriksaan sesuai SOP dan aturan pemeriksaan yang berlaku, serta memastikan temuan pemeriksaan dibangun dengan Dasar Fakta dan Dasar Hukum yang kuat dengan memperhatikan data yang diberikan WP untuk menghasilkan SKP yang disetujui oleh WP
4. Bersinergi dengan Seksi Pengawasan pada saat pengajuan usul DSPP untuk memperoleh data mengenai status WP dan data transaksi, sehingga temuan pemeriksaan dapat lebih optimal dan nilai potensi usulan dapat direalisasikan menjadi nilai SKP

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	116,96%	117.03%	100.20%

➤ 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	48,00%	75,00%	75,00%	111,85%	111,85%	117,84%	117,84%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120,00%

- **Deskripsi**

"Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP"

- **Definisi IKU**

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)."

- **Formula IKU**

**Formula:**

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- **Realisasi IKU**

Dalam proses mencapai realisasi IKU yang melebihi target, tentu terdapat kendala yang dihadapi, antara lain yaitu :

1. Menyampaikan surat permintaan pemblokiran terhadap rekening penanggung jawab/ wajib pajak
2. Melaksanakan tindakan penagihan aktif secara maksimal terutama pada wajib pajak yang masuk dalam DSPC

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Tingkat efektivitas penagihan	117,84%	114.00%	120.00%

➤ 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0%	0%	0,00%	0%	0%	100%	100,00%

- **Deskripsi**

"Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP"

- **Definisi IKU**

"Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan."

- **Formula IKU**

**Formula:**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan berusaha mencapai realisasi dengan Melakukan pembahasan rutin antara AR dengan FPP terhadap potensi WP yang akan diusulkan untuk diperiksa sehingga membuat IKU ini dapat tercapai 100%

1. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		

#### H. Data dan Informasi yang Berkualitas

- 08a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	103,20%	100,19%	100,19%	60,00%	60,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120%	120%	120%	75%	75%	120%	120,00%

- **Deskripsi**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- **Formula IKU**

**Formula****1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi Maksimal}} \times 100\%$$

**Realisasi Maksimal 120%****2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi Maksimal}} \times 100\%$$

**Realisasi Maksimal 120%**

$$\frac{\left( \frac{\text{Realisasi 1}}{\text{Realisasi Maksimal 1}} \right) + \left( \frac{\text{Realisasi 2}}{\text{Realisasi Maksimal 2}} \right)}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU**

Pada tahun 2024 realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan Adalah 120%.

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%	126,93%	120.00%

➤ 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	49,00%	63,76%	63,76%	75,50%	75,50%	85,00%	85,00%
Capaian	120%	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

"IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023."

- **Formula IKU**

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$$

" Realisasi Tahun 2024 = "

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$$

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024 KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mencapai realisasi 85% untuk mencapai realisasi tersebut di lakukan Koordinasi dengan kanwil untuk memudahkan penghimpunan data dan Menghubungi kecamatan atau kelurahan yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru guna menghimpun data ILAP

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	85,00%	75,69%	

## I. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

- 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	115	102,89	102,89	120	120	116,36	116
Capaian	115	102,89	102,89	120	120	116,36	116

- **Deskripsi**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

**Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

<b>Formula</b>	
<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	$(Capaian\ Komponen\ 1\ x\ 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2\ x\ 50\%)$ <p>ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120</p>

- **Realisasi IKU**

Pada Tahun 2024 realisasi Iku tercapai 116.36 beberapa hal yang dilakukan selama 2024 untuk mencapai realisasi adalah:

1. Melaksanakan IHT Pengembangan Kompetensi FPP
2. IHT Penggalan Potensi Sektoral
3. IHT mengenai Bijak dan Santun dalam Penggunaan Media Sosial
4. Sosialisasi budaya anti korupsi
5. Sosialisasi tentang gratifikasi
6. Sosialisasi penilaian objektif berintegritas
7. IHT mengenai Pengelolaan Kinerja
8. IHT mengenai Uji Kompetensi pada Sidang Penilaian Jabatan dan Peringkat

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	116,36		

➤ 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target				85	85	85	85
Realisasi				70,00	70,00	79,01	79,01
Capaian				82,35	82,35	93	92,95

- **Deskripsi**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

"IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak."

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- **Realisasi IKU**

Satu IKU yang belum tercapai realisasinya adalah Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu 79,01. Karena hal ini KPP Pratama Pekanbaru Senapelan bahwa berikutnya akan Melaksanakan layanan sesuai dengan SOP, memastikan tidak ada pelanggaran integritas dan memberikan layanan yang memuaskan bagi wajib pajak

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Indeks Penilaian Integritas Unit	79,01	93.39	93.21

- 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	25,94	53,39	53,39	86,65	86,65	99,33	99,33
Capaian	112,78	113,60	113,60	120	120	110	110,37

- **Deskripsi**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

## 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

## Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

- **Formula IKU**

**Formula**

**Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko**

- **Realisasi IKU**

Hal yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pimpinan dan BOD memiliki komitmen tinggi untuk menyelenggarakan dan menjadikan rapat DKO serta Mitigasi Risiko sebelum tanggal 7 setiap bulan sebagai bagian dari kegiatan rutin sepanjang tahun dan Mengumpulkan dokumen rencana aksi mitigasi risiko pada laporan pemantauan triwulanan

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	99,33	98.87%	100.00%

**J. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel**

➤ 10a-Cp Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	104,71	99,88	99,88	120,00	120,00	120	120
Capaian	104,71	99,88	99,88	120,00	120,00	120	120

- **Deskripsi**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- **Formula IKU**

**Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0**

**Formula Tw I, dan II**

Realisasi IKPA/95,0

**Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
--------	----------

120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 **$ ( $80 < x < 91$ )
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan melakukan Penggantian uang persediaan setiap bulan agar nilai IKPA dapat mencapai nilai maksimal sebesar 95% sehingga pada tahun 2024 realisasi yang dicapai sebesar 120

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120	100.12%	98.64%

**C. Upaya – upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

- Secara umum, extra effort, baik melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan, dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak dominan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu Wajib Pajak OP Prominen
- Pada seksi Pengawasan Strategis, upaya extra effort dilakukan dengan melakukan penelitian komprehensif bersama Supervisor sehingga dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis.
- Pada seksi Pengawasan Kewilayahan, upaya effort dilakukan dengan kegiatan intensifikasi melalui pendekatan kewilayahan terhadap Wajib Pajak lainnya dan melalui kegiatan ekstensifikasi untuk menambah basis pajak.
- Tindak lanjut pemanfaatan data approweb
- Pemeriksaan yang berkualitas
- Optimalisasi kegiatan penagihan pajak

- g. Ekstensifikasi yang berkelanjutan
- h. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan ke OPD yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
- i. Membuat Nota Dinas ke Wajib Pajak yang memiliki jumlah pegawai yang banyak

**D. Analisis atas Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a. Tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan terutama disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dan juga dibantu dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta atas upaya-upaya optimalisasi kegiatan intensifikasi terutama untuk Wajib Pajak dominan yaitu WP HWI dan kegiatan ekstensifikasi untuk menambah basis pajak yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
- b. Tidak tercapainya target kepatuhan SPT Tahunan PPh disebabkan karena kurang optimalnya upaya yang telah dilakukan. Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT akan dilakukan melalui peningkatan kualitas data, misalnya terhadap Wajib Pajak yang telah lapor dalam 3 tahun terakhir, Wajib Pajak yang mengikuti program TA namun belum lapor, Wajib Pajak yang telah membayar PPh Final PP23 namun belum lapor dll. Himbauan akan dilakukan melalui surat, WA blast, maupun email, outbond call, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan ke OPD yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan serta membuat nota dinas ke wajib pajak yang memiliki jumlah pegawai yang banyak.

**E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dihitung dengan membandingkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan realisasi penggunaan anggaran. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2024 sebesar 108.21. dan realisasi penggunaan anggaran KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebesar 120%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebesar 100%. Dengan demikian sumber daya sudah digunakan secara efisien dalam menunjang pencapaian kinerja.

**F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- a. Penggalian potensi terhadap Wajib Pajak dominan yaitu WP OP HWI telah dilaksanakan sehingga mendorong pertumbuhan penerimaan jenis pajak PPh OP namun hal tersebut masih harus ditingkatkan guna mempertahankan tercapainya target penerimaan di tahun 2024 terutama terhadap WP OP yang selama ini belum pernah dilakukan kegiatan intensifikasi.
- b. Upaya peningkatan kepatuhan SPT Tahunan telah dilakukan melalui pemasangan spanduk, penyebaran leaflet, penggunaan mobil keliling, kerjasama dengan Tax Center di berbagai universitas di kota pekanbaru, himbuan pelaporan SPT melalui media sosial KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, *reminder* (peringat) untuk melapor SPT Tahunan melalui SMS blast, Whatsapp blast dan outbond call. Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di 2024 akan dilakukan melalui peningkatan kualitas data sehingga Wajib Pajak yang akan dilakukan himbuan menjadi lebih tepat sasaran.

**G. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang telah dibuat di awal tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel A.3 Mitigasi Risiko

DAFTAR RISIKO						
KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN						
TAHUN 2024						
No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko			
			Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun		
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1.2 Shortfall Penerimaan	25	14		

	2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2.1	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	22	18
	3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3.1	kualitas dan kuantitas hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan target/tidak sesuai rencana	22	18
			3.2	Penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) Intensifikasi dan Ekstensifikasi tidak mencapai target	22	18
			3.3	Penerimaan dari kegiatan tindakan penagihan aktif tidak optimal	17	7
			3.4	Penerimaan pajak dari kegiatan penilaian tidak optimal	13	3
	4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4.1	Kualitas pelayanan dan penyuluhan kurang optimal dan tepat sasaran	16	6
	5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5.1	Penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa berupa Penerbitan STP, Dinamisasi PPh Pasal 25 dan Tindak Lanjut Data Matching Wajib Pajak kewilayahan tidak mencapai target	16	6
	6	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	6.1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis dan kewilayahan yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	13	10
	7	Penegakan Hukum Yang Efektif	7.1	Ketetapan yang terbit tidak dapat dicairkan	22	12
	8	Data dan informasi yang berkualitas	8.1	Kurang tersedianya data potensi perpajakan untuk menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan	10	10
			8.2	Struktur data ILAP diterima tidak sesuai dengan format yang ditetapkan	13	11
	9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI),	24	13

				Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum		
			9.2	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	13	11
			9.3	Kompetensi pegawai tidak merata	6	6
	10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10.1	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran	6	6

Dengan disusunnya perkiraan risiko dan bagaimana memitigasi risiko yang diperkirakan akan terjadi dapat membantu target kinerja pada tahun 2024. Penerapan mitigasi risiko membantu tercapainya Indeks Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2024 mencapai 108.21 . Dapat disimpulkan bahwa rencana aksi telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka pencapaian kinerja.

#### H. Rencana Aksi ke depan

- a. Melakukan optimalisasi kegiatan intensifikasi terutama terhadap Wajib Pajak dominan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu WP OP HWI sehingga dapat menunjang capaian penerimaan.
- b. Melakukan kegiatan ekstensifikasi yang lebih masif melalui penedekatan kewilayahan sehingga dapat menambah basis pajak dalam rang menunjang pertumbuhan penerimaan,
- c. Melakukan peningkatan kualitas data dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sehingga Wajib Pajak menjadi tepat sasaran.
- d. membuat surat himbuan dan melakukan koordinasi dengan wajib pajak pemberi kerja untuk menerbitkan bukti potong karyawan 1721-A1 dan meminta kepada seluruh kaeyawan yang wajib menyampaikan SPT tahunan untuk segera melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu

- e. Membuat surat himbauan dan melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah/badan kepegawaian daerah/instansi pemerintah agar para bendahara segera menerbitkan bukti potong 1721-A2 dan membuat himbauan kepada ASN dan tenaga honorer di instansi masing-masing untuk dapat melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu
- f. mengingatkan kepada wajib pajak melalui WA blast agar menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu
- g. Melakukan sosialisasi atau pengadaan kelas pajak SPT Tahunan
- h. Melakukan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan tepat waktu melalui media sosial

### I. Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Utama terkait dengan anggaran adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. IKU ini diukur berdasarkan  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100). Berikut disajikan tabel indikator pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi anggaran tahun 2024.

Tabel Indikator Pelaksanaa Anggaran

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	015	119731	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Perincian pencapaian penyerapan anggaran untuk setiap jenis output DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pendapatan	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
Penerimaan Perpajakan	1.934.504.219.000	1.750.714.846.609	90
Penerimaan Negara Bukan Pajak	284.845.000	19.897.394	7
Jumlah Pendapatan	1.934.789.064.000	1.750.734.744.003	90

Belanja	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
Belanja Pegawai	861.019.000	860.344.000	99.92
Belanja Barang	3.278.873.000	3.197.472.349	97.52
Belanja Modal	181.864.000	181.068.540	99.56
Jumlah Belanja	4.321.756.000	4.238.884.889	95

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang sangat baik. Sebanyak 19 IKU dapat melebihi target, sementara terdapat 1 IKU yang belum tercapai dan akan terus dilakukan upaya yang optimal untuk mencapai target tersebut di tahun 2025. Diharapkan dengan peningkatan kinerja yang baik di tahun 2025, IKU yang belum tercapai tersebut dapat tercapai.

Pekanbaru, 30 Januari 2025  
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Pekanbaru Senapelan



Ditandatangani secara elektronik  
Suhardiman

